

Laporan Akhir

Kajian Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Wonosobo



BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

2023

KATA PENGANTAR

Dengan penuh syukur dan rasa hormat, kami ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam atas berkah dan bimbingan dari Allah SWT yang telah mengarahkan perjalanan kami dalam menyelesaikan studi dengan judul , "Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Wonosobo". Kajian ini merupakan hasil kolaborasi antara Bappeda Kabupaten Wonosobo dan tim peneliti telah melibatkan berbagai pihak dalam pencarian data dan diskusi yang diperlukan. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dr. Jaelan, S.KP., M.Kes, sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo
2. Prof. Dr. Jamari, ST., MT, sebagai Ketua LPPM Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan penuh dalam melakukan riset ini.
3. Para Pimpinan Bidang bidang ekonomi BAPPEDA Kabupaten Wonosobo beserta jajaran
4. Para staf LPPM Universitas Diponegoro
5. Pengambil kebijakan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo

Kami sangat menghargai saran serta kritik yang konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan dan penelitian di masa mendatang. Semoga hasil dari studi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua yang terlibat.

Demikianlah harapan kami, bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan wilayah terkait.

Wonosobo, 9 Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	0
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sasaran	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1 Produk Unggulan Daerah	11
2.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	12
2.3 Hubungannya antar Produk Unggulan Daerah dengan Pertumbuhan Daerah	16
2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Indikatornya.....	18
2.5 Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi	21
2.6 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi	24
2.7 Pendekatan Produk Unggulan Daerah	25
2.6 Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis Komoditas Lokal	26
2.7 Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi	27
2.8 Konsep Dasar Model Input-Output	28
2.9 Asumsi Model Input-Output	30
2.10 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah 32	
2.11 Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Metode Pengumpulan Data	35
3.2. Jenis Data	36

3.3. Metode Analisis Data	37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo	43
4.2 Analisis Input-Output Produk Unggulan Kabupaten Wonosobo.....	70
4.3 Hasil Analisis Kontribusi Sektor-Sektor perekonomian Wonosobo.....	71
4.4 Analisis Keterkaitan antar sektor dan Penentuan Sektor Unggulan	73
4.5 Hasil Analisis I-O: Backward Forward Linkage	74
4.6 Tata Kelola Manajemen Produk Unggulan Daerah Kabupaten Wonosobo	77
BAB V PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Berlaku	3
Tabel 1.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Konstan	4
Tabel 4.1	Luas Daerah, Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Wonosobo	46
Tabel 4.2	Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo	47
Tabel 4.3	Data Penduduk Wonosobo Tahun 2022 Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan	52
Tabel 4.4	Data Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	52
Tabel 4.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 4.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo (persen) Tahun 2021-2022	54
Tabel 4.7	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo (persen) Tahun 2021-2022	54
Tabel 4.8	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Berlaku	55
Tabel 4.9	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022	56
Tabel 4.10	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	57
Tabel 4.11	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB perkapita Kabupaten Wonosobo 2018-2022	58
Tabel 4.12	Komponen IPM Tahun 2019-2022 Kabupaten Wonosobo	60
Tabel 4.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019-2022	61

Tabel 4.14	Posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2022	62
Tabel 4.15	Posisi Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2022	63
Tabel 4.17	Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	65
Tabel 4.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022 (Ribuan Jiwa)	66
Tabel 4.19	Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020-2022	67
Tabel 4.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022	68
Tabel 4.21	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo 2019-2022	69
Tabel 4.22	Tingkat Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022	70
Tabel 4.23	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo (miliar rupiah), 2018–2022	72
Tabel 4.24	IBL dan IFL Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	75
Tabel 4.25	IBL dan IFL Menurut Sub-Sektor Perekonomian di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	76

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 4.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo	45
Gambar 4.2	Peta Geologi Kabupaten Wonosobo	49
Gambar 4.3	Skema Governance	79
Gambar 4.4	Tawaran Governance	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bertujuan mengarahkan suatu wilayah menuju perkembangan yang diinginkan secara berkelanjutan. Secara filsafat, pembangunan merupakan usaha terencana dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat. Harapannya, melalui pembangunan ini, masyarakat akan mengalami perbaikan yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih baik. Di era kerjasama saat ini, pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah dan masyarakatnya bekerja sama dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna merancang perekonomian daerah yang lebih baik. Pengembangan ekonomi lokal dimulai dengan mengidentifikasi produk unggulan dari sektor usaha sebagai upaya optimalisasi potensi ekonomi daerah. Pendekatan ini dianggap mandiri dalam pengembangan ekonomi suatu daerah dan efektif dalam pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah merupakan langkah awal dalam menciptakan pusat pertumbuhan dengan berbagai jenis produk secara terpadu. Ini menjadi dasar kuat dalam pembangunan baik secara lokal maupun regional. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dan tata kelola yang baik dalam pembangunan ekonomi daerah guna mengejar ketertinggalan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perencanaan berbasis potensi dan karakteristik wilayahnya.

Inventarisasi potensi daerah menjadi kunci dalam penetapan kebijakan pengembangan sektoral maupun multisektoral. Salah satunya adalah identifikasi produk potensial dan unggulan di setiap sektor ekonomi. Produk unggulan mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah, memanfaatkan sumber daya, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan investasi.

Kabupaten Wonosobo memiliki beragam produk unggulan yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah meliputi pemetaan, pembuatan database potensi unggulan, serta kajian mendalam tentang produk-produk tersebut. Kajian ini diharapkan menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pemasaran dan pengembangan produk unggulan daerah.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah ukuran nilai keseluruhan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB bisa diukur atas harga berlaku (*current prices*) dan atas harga konstan (*constant prices*). PDRB atas harga berlaku mengacu pada nilai total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dengan memperhitungkan harga-harga saat itu. Ini mencakup perubahan harga dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas harga konstan mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa dengan menggunakan harga yang sama untuk kedua tahun yang dibandingkan. Ini bertujuan untuk menghilangkan efek dari

perubahan harga. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih objektif terkait pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga.

Berdasarkan data PDRB atas harga berlaku dan konstan yang di keluarkan oleh BPS, menunjukkan bahwa :

Tabel 1.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Berlaku

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.021.610,84	5.253.822,70	5.475.274,62	5.855.198,79	6.025.201,52	6.390.439,70
B. Pertambangan dan Penggalan	154.965,21	162.897,14	184.204,85	192.879,92	213.431,20	216.017,95
C. Industri Pengolahan	2.824.021,40	3.088.400,44	3.346.650,85	3.408.678,82	3.661.164,60	3.877.945,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.439,91	5.721,18	5.973,73	6.054,37	6.377,34	6.734,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.605,72	17.527,45	18.662,87	19.967,95	20.946,29	2.188,30
F. Konstruksi	1.067.205,00	1.182.811,28	1.279.556,09	1.237.500,88	1.365.241,71	1.472.643,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.731.288,99	2.957.569,62	3.223.474,81	3.122.136,58	3.392.559,04	3.602.356,97
H. Transportasi dan Pergudangan	841.192,52	907.215,95	1.000.987,24	731.584,76	774.128,43	1.246.861,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	520.348,07	558.391,04	612.543,61	527.620,87	570.851,22	703.170,45
J. Informasi dan Komunikasi	193.718,08	223.460,22	261.854,54	299.564,26	317.517,87	333.696,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	527.259,53	567.158,31	601.027,01	609.534,99	651.206,20	711.962,25
L. Real Estate	247.032,76	266.297,73	289.767,53	290.176,84	298.925,15	313.352,42
M,N. Jasa Perusahaan	43.122,83	47.860,86	54.095,31	51.592,82	53.612,95	57.789,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427.107,64	449.847,69	469.787,46	470.103,05	460.070,39	475.777,16
P. Jasa Pendidikan	1.039.865,84	1.142.078,75	1.251.249,62	1.278.336,98	1.296.730,30	1.336.929,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233.504,17	258.024,00	283.601,87	313.900,26	317.415,25	329.983,93
R,S,T,U. Jasa lainnya	360.814,89	404.160,49	448.952,09	423.846,93	431.482,90	493.069,08
Produk Domestik Regional Bruto	16.255.103,40	17.493.244,85	18.807.664,10	18.838.679,07	19.856.862,36	21.590.618,38

Apabila dilihat dari PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Berlaku, maka sektor PRDB Lapangan usaha di dominasi oleh : sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Konstruksi dan sektor jasa pendidikan.

Berikut 5 sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022. Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 6390,44 miliar pada tahun 2022, disusul sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 3877,95 miliar. Ketiga sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor dengan nilai 3602,36 miliar. Kemudian keempat yaitu sektor Kontruksi dengan nilai 1472,64 miliar. Dan yang kelima dari sektor Jasa Pendidikan dengan nilai 1336,93 miliar

Tabel 1.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Konstan

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Harga Konstan 2010					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.529,73	3.882.422,15	3.956.965,97	4.148.317,81	4.210.787,05	4.304.002,87
B. Pertambangan dan Penggalian	109.522,01	112.549,94	125.758,12	128.787,79	141.239,46	138.866,64
C. Industri Pengolahan	2.047.524,59	2.181.512,90	2.330.458,70	2.333.754,87	2.443.792,40	2.496.621,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.730,93	4.821,62	5.027,12	5.116,42	5.413,51	5.644,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.760,91	15.501,22	16.234,00	16.571,62	17.217,15	17.570,10
F. Konstruksi	805.574,23	860.882,33	905.514,00	872.833,90	931.604,55	954.056,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.256.317,07	2.381.575,64	2.540.523,03	2.435.274,23	2.611.709,37	2.663.802,96
H. Transportasi dan Pergudangan	731.102,92	782.391,42	847.535,80	597.044,69	613.211,48	932.582,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	397.631,00	423.472,22	460.332,31	398.099,95	422.974,08	504.651,00
J. Informasi dan Komunikasi	200.562,85	231.426,92	268.745,00	306.978,61	324.926,94	341.108,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	370.157,05	385.462,45	400.326,39	405.837,69	415.534,60	421.346,25
L. Real Estate	212.389,45	223.661,21	239.584,23	238.428,90	243.335,40	251.000,47
M,N. Jasa Perusahaan	31.595,25	34.238,82	37.756,04	35.236,45	36.244,76	38.035,25
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300.738,56	312.992,41	322.045,31	317.884,46	314.415,29	318.408,36
P. Jasa Pendidikan	679.263,91	729.289,11	785.215,74	783.378,27	786.711,11	796.702,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.452,41	183.711,81	198.165,19	213.569,98	214.263,66	218.698,92
R,S,T,U. Jasa lainnya	288.195,97	319.929,47	352.853,32	329.060,61	331.383,89	367.405,32
Produk Domestik Regional Bruto	12.436.048,84	13.065.841,64	13.793.040,27	13.566.176,25	14.064.764,70	14.770.503,78

Sedangkan apabila dilihat dari PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga konstan, maka sektor PRDB Lapangan usaha di dominasi oleh : sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Industri Pengolahan.

Kabupaten Wonosobo, sebagai bagian dari wilayah dengan keberagaman geografis dan potensi alam yang melimpah, memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi terhadap perekonomian regional. Dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi ini, perlunya pengkajian yang lebih mendalam terhadap produk unggulan daerah sebagai landasan strategis untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Wonosobo dalam pengembangan produk unggulan melibatkan sejumlah kendala signifikan, mulai dari infrastruktur yang belum optimal, keterbatasan permodalan, hingga tantangan dalam strategi pemasaran dan akses pasar. Upaya untuk mengatasi tantangan ini menjadi kunci dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah dan memastikan keberhasilan pengembangan produk unggulan di tingkat lokal."

Peran inovasi dan teknologi dalam pengembangan produk unggulan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas serta daya saing produk-produk yang dihasilkan di suatu daerah. Penerapan teknologi modern, seperti integrasi sistem digital, penggunaan algoritma cerdas, atau optimalisasi proses produksi dengan teknologi canggih, menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas produk unggulan. Dengan menerapkan teknologi ini, Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki standar kualitas produk, serta merancang inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global. Sehingga, integrasi inovasi dan teknologi tidak hanya memperkaya produk unggulan daerah, tetapi juga memperkuat daya saingnya dalam kancah ekonomi yang terus berkembang.

Pengembangan produk unggulan di Kabupaten Wonosobo diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Peningkatan kesejahteraan diharapkan akan tercapai melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta kesempatan kerja baru yang dihasilkan dari pengembangan produk unggulan. Selain itu, diantisipasi bahwa langkah ini akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, memberikan

akses lebih luas terhadap sumber penghasilan, dan memperkuat stabilitas ekonomi keluarga di Kabupaten Wonosobo.

Begitu pula dengan peran perempuan dan kelompok rentan diharapkan akan semakin terbuka lebar dalam perekonomian daerah, terutama melalui partisipasi mereka dalam produksi dan pemasaran produk unggulan. Dengan adanya kesempatan yang lebih merata, diharapkan perempuan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, sementara kelompok rentan akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja dan kesempatan ekonomi yang sebelumnya terbatas. Pengembangan produk unggulan diharapkan bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi inklusifitas sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Integrasi produk unggulan Kabupaten Wonosobo dengan pasar global merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat lokal maupun internasional. Upaya integrasi ini melibatkan serangkaian langkah strategis, termasuk penyesuaian terhadap standar kualitas internasional, strategi pemasaran yang lebih luas, serta pengembangan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar global.

Adaptasi terhadap standar kualitas internasional menjadi kunci dalam memasuki pasar global. Dengan memastikan bahwa produk unggulan memenuhi atau bahkan melebihi standar yang berlaku secara internasional, Kabupaten Wonosobo dapat memperoleh kepercayaan pasar global. Langkah selanjutnya adalah penggunaan strategi pemasaran yang tepat, seperti pemanfaatan teknologi

digital untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun citra merek yang kuat di tingkat internasional.

Tidak hanya itu, inovasi produk yang terus-menerus juga merupakan aspek penting dalam menarik minat pasar global. Dengan mengadopsi teknologi modern dan penelitian terkini, Kabupaten Wonosobo dapat mengembangkan produk unggulan yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren pasar global.

Pengintegrasian produk unggulan dengan pasar global tidak hanya memperluas peluang ekspor, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya dan teknologi baru. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan hubungan yang lebih kokoh antara Kabupaten Wonosobo dengan pasar global yang beragam.

Infrastruktur pendukung memegang peran krusial dalam kesuksesan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Wonosobo. Infrastruktur yang baik dan handal, seperti jaringan transportasi, akses telekomunikasi, listrik yang stabil, serta fasilitas penunjang lainnya, sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor kunci yang berperan dalam pengembangan produk unggulan.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam memperbaiki infrastruktur pendukung di Kabupaten Wonosobo menjadi fokus utama. Perbaikan jaringan transportasi, baik jalan raya maupun akses ke pelabuhan atau bandara, diharapkan dapat mempermudah distribusi produk ke pasar lokal maupun ekspor ke pasar global. Selain itu, peningkatan akses terhadap teknologi dan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi prioritas untuk mendukung komunikasi dan pemasaran produk secara lebih efektif.

Adaptasi infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan sektor-sektor kunci seperti pertanian, industri, perdagangan, serta inovasi teknologi juga menjadi bagian penting dalam perencanaan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor tersebut, memperkuat rantai pasok produk unggulan, serta meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global.

Dengan memperbaiki infrastruktur pendukung, Kabupaten Wonosobo dapat mengoptimalkan potensi sektor-sektor kunci yang mendukung pengembangan produk unggulan. Dengan demikian, terbuka peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta kesempatan yang lebih baik untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Produk Unggulan di Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pasar Ekspor:
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Pasar Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan:
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah:
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023:
10. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pariwisata:
11. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
12. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal:

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mengkaji secara ilmiah produk/komoditas unggulan Kabupaten Wonosobo. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Mengidentifikasi dan memetakan produk unggulan berdasarkan keragaman produk dan lokasi produksi kemudian disusun dalam *database* produk unggulan daerah (PUD) yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Wonosobo;
2. Mengidentifikasi dan mengkaji seluruh produk unggulan daerah (PUD) yang memiliki dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat, mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai produk yang berorientasi ekspor, serta menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo;

3. Mengkaji produk unggulan daerah sebagai basis pembentukan klaster industri unggulan;
4. Merumuskan strategi peningkatan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah (PUD) Kabupaten Wonosobo.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan penelitian ini meliputi:

1. Informasi mengenai produk unggulan daerah (PUD)
2. Identifikasi one village one products (OVOP).
3. Identifikasi ketersediaan bahan baku produk unggulan
4. Identifikasi pangsa pasar dan tata cara pemasaran produk unggulan
5. Rekomendasi pengembangan kelembagaan bagi pengembangan produk unggulan di Kabupaten Wonosobo.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Produk Unggulan Daerah

Untuk memahami konsep produk unggulan daerah, perlu ditelusuri berbagai definisi dan sudut pandang dari berbagai sarjana dan sumber (Saraswati, 2021) . menekankan pentingnya mengidentifikasi penyerapan tenaga kerja dalam konteks sektor ekonomi potensial di suatu daerah (Anam et al., 2022) . lebih lanjut menggarisbawahi bahwa penetapan produk unggulan daerah menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pengembangan sektor usaha produktif, sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Darlen dkk. (2015) menekankan pentingnya mengembangkan daerah berdasarkan potensi dominannya, sehingga memungkinkan dirancangnya strategi pembangunan yang tepat dan terciptanya iklim investasi yang menarik. Lebih jauh lagi, analisis produk unggulan daerah juga mencakup implikasi praktisnya. Misalnya, Fauzi dkk. (2022) membahas strategi pengembangan usaha kecil dan menengah, menekankan pentingnya menjaga kualitas produk, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan alat produksi yang inovatif. Apalagi Cahyono dkk. (2020) mengusulkan strategi seperti meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan pemasaran online untuk mengembangkan produk makanan tradisional, yang menunjukkan beragam pendekatan pengembangan produk dalam konteks regional. Selain aspek ekonomi, produk unggulan daerah juga mempunyai implikasi hukum dan kekayaan intelektual dan menonjolkan peran pemerintah daerah dalam

mendukung potensi produk pertanian berindikasi geografis, menekankan pada perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan produk khas daerah yang berakar pada pengetahuan tradisional dan kearifan lokal (Ganindha & Sukarmi, 2020). Identifikasi dan pengembangan produk unggulan daerah melibatkan berbagai metodologi dan analisis berdasarkan publikasi oleh Cahyaputri & Sangadah (2022) membahas komponen penghitungan metode Hayami, yang memberikan wawasan tentang faktor konversi, koefisien tenaga kerja, nilai produk, dan tingkat keuntungan, menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi aspek ekonomi produk daerah. Apalagi konsep produk unggulan daerah merambah pada pemanfaatan sistem elektronik pemerintahan menggambarkan penerapan sistem pemerintahan elektronik di Indonesia dan beberapa daerah yang menunjukkan integrasi kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpotensi mendukung promosi dan pengembangan produk unggulan daerah (Kurniawansyah & Alinse, 2019). Kesimpulannya, konsep produk unggulan daerah mencakup pemahaman yang multidimensi, meliputi aspek ekonomi, hukum, teknologi, dan pembangunan. Penting bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan beragam perspektif dan metodologi ketika melakukan penelitian terhadap produk-produk unggulan regional untuk memastikan hasil yang komprehensif dan efektif.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk memahami konsep produk unggulan daerah, penting untuk mendalami pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai ulama dan sumber telah memberikan wawasan mengenai fenomena ini (Soleh, 2015) .

menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan segmen masyarakat miskin, dan menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif (Soleh, 2015) . Gagasan ini juga didukung oleh Pangiuk (2018) yang mengeksplorasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya. Selain itu, Manafe dkk. (2021) berkontribusi pada wacana tersebut dengan membahas anteseden pertumbuhan ekonomi, khususnya hubungan antara pendapatan dan belanja daerah. Memahami pertumbuhan ekonomi regional menghasilkan banyak manfaat dan kegunaan. Hal ini berfungsi sebagai indikator penting dari keseluruhan pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah (Prihastuti et al., 2015) . menggarisbawahi pentingnya kinerja keuangan dalam mempengaruhi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu (Prihastuti et al., 2015). Lebih lanjut, Fadillah dkk. (2022) menyoroti pentingnya menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan, sehingga memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan (Fadillah et al., 2022). Selain itu, Nurhafizah & Mafruhah (2021) menekankan relevansi mempelajari pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga menawarkan pemahaman komprehensif tentang sifat kemiskinan yang beragam dalam konteks regional (Nurhafizah & Mafruhah, 2021) . Kesimpulannya, eksplorasi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk memahami dinamika pembangunan daerah dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beragam perspektif dan metodologi yang dikemukakan oleh para

sarjana berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang sifat multifaset pertumbuhan ekonomi dalam konteks regional.

Perluasan atau peningkatan dari *gross domestic product potensial* atau output dari suatu negara ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi (Samuelson, 1997). Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memprediksi serta membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada lima faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Sumber daya manusia, yang di dalamnya meliputi tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. SDM merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh SDM. Cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan proses pembangunan yang akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi.
2. Sumber daya alam. Faktor produksi kedua adalah tanah. Sumber daya yang penting disini adalah tanah yang dapat ditanami, minyak dan gas, hutan, air serta bahan mineral lain. Oleh karena itu sebagian besar negara berkembang bergantung kepada sumber daya alamnya dalam melaksanakan proses pembangunan ekonomi. Jika proses pembangunan ekonomi berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Tetapi sumber daya alam tidak dapat menjamin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jika tidak

didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Modal. Sumber daya modal sangat dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam dan IPTEK. Banyak negara yang tumbuh cepat karena cenderung menanamkan modal pada barang modal baru. Dengan semakin berkembangnya pengelolaan sumber daya alam, IPTEK dan penanaman modal yang baik, maka dapat memperlancar pembangunan dan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin proses pengelolaan dan penanaman modal dengan baik sehingga perkembangan pembangunan berjalan lancar dan dapat semakin meningkatkan produktivitas.
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat akan mendorong percepatan proses pembangunan. Adanya pergantian pola kerja yang beralih menggunakan mesin-mesin berdampak pada efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi dan akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
5. Faktor Budaya. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Budaya yang mendorong proses tersebut seperti sifat ulet, jujur, kerja keras, dan pantang menyerah. Sedangkan budaya yang menghambat seperti egois, KKN, dan sebagainya.

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomi), suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu: output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

2.3 Hubungannya antar Produk Unggulan Daerah dengan Pertumbuhan Daerah

Hubungan antara produk unggulan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks dan multifaset, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kebijakan. Untuk memahami dan menerapkan hubungan ini secara efektif, beberapa aspek utama perlu dipertimbangkan. Pertama, dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah telah menjadi subjek penelitian ekstensif Fitri & Putri (2019). Alokasi belanja modal dan belanja pegawai oleh pemerintah daerah terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk menilai dan mengoptimalkan kebijakan fiskal secara cermat guna

mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Selain itu, desentralisasi kebijakan fiskal, investasi, dan pembangunan manusia telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan efektivitas investasi pemerintah dan mengawasi pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada pengembangan produk unggulan daerah. Selain itu, strategi pemasaran digital dalam perdagangan, seperti produk pertanian, telah diakui sebagai kontributor potensial terhadap peningkatan pendapatan daerah (Krisnawati dkk., 2019). Oleh karena itu, penerapan pendekatan pemasaran yang inovatif dan pemanfaatan platform digital dapat berperan penting dalam mempromosikan produk unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengaruh kinerja keuangan daerah, pajak daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian (Rifai & Priono, 2022). Memahami dinamika aspek keuangan tersebut sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi efektif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan produk unggulan daerah. Kesimpulannya, keterkaitan antara produk unggulan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah sangatlah rumit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal, desentralisasi, investasi, dan kinerja keuangan. Untuk menerapkan hubungan ini secara efektif, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan harus fokus pada optimalisasi kebijakan fiskal, mendorong investasi dalam

pembangunan manusia, menerapkan strategi pemasaran digital, dan memahami dampak dinamika keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Indikatornya

Menurut Jhingan (2007), pada awalnya ilmu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi muncul karena adanya kesadaran dari negara–negara maju bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana pun. Lebih lanjut Meier dan Baldwin dalam Jhingan (2007) mengatakan bahwa pengkajian mengenai kemiskinan bangsa-bangsa bahkan terasa lebih mendesak daripada pengkajian kemakmurannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006 : 18). Lebih lanjut Todaro dan Smith (2009) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses stabil dimana kapasitas produksi ekonomi meningkat dari waktu ke waktu yang dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran nasional.

Sukirno (2006) berpendapat bahwa pengertian dari pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan dapat

meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat semakin membaik.

Schumpeter dalam Jhingan (2007) menyatakan bahwa perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus - putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Lebih lanjut, Jhingan (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga cara dalam mendefinisikan perkembangan ekonomi.

Definisi pertama, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Pendapatan nasional nyata menunjuk pada keseluruhan output barang-barang jadi dan jasa dari negara tersebut, bukan dalam bentuk uang. Akan tetapi hal ini tidak sesuai kenyataan karena di dalam perekonomian, keberagaman harga tidak terelakkan. Definisi kedua, berkaitan dengan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Para ekonom mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan atau *output* per kapita. Definisi ini bermaksud menekankan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Definisi ketiga, ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik - titik kesejahteraan ekonomi. Dalam definisi ini, perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata per kapita naik akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya, Prabowoningtyas (2011) menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata - rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional adalah nilai produksi barang - barang dan jasa - jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah pendapatan per kapita.

Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, tidak dapat diukur secara langsung, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukurnya. Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya.

2. Produk Domesti Bruto Per kapita / Pendapatan Per kapita

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata - rata.

2.5 Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pengertian umum, sumber daya alam didefinisikan sebagai komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. (Fauzi, 2010 :2) Pengertian sumber daya sendiri sudah konsep ketika dalam ilmu ekonomi, Adam Smith menerbitkan buku "Wealth of Nation" pada tahun 1776, dimana sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dalam pengertian ini berarti sumber daya alam dapat diartikan sebagai komponen utama yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut Fauzi (2010 : 6) mengelompokkan sumber daya alam menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*)

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumber daya tersebut karena menghabiskan cadangan sumber daya tersebut. Sumber daya alam

ini memiliki kemungkinan tidak tersedia lagi pada masa mendatang. Yang termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yaitu mineral, logam, minyak dan gas bumi. Sumber daya ini diyakini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, bahkan dibutuhkan sebuah inventarisasi dan evaluasi tentang sumber daya alam yang tersedia.

2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable*)

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui sering disebut sebagai flow, sumber daya yang dapat diperbaharui dianggap sebagai sumber daya alam yang memiliki jumlah kuantitas fisik dan berubah sepanjang waktu. Jumlah sumber daya yang kita manfaatkan sekarang dapat mempengaruhi dan dapat tidak mempengaruhi terhadap ketersediaan atau stok sumber daya di masa depan. Proses regenerasi pada sumber daya alam yang dapat diperbarui tergantung pada proses biologi.

Sumber daya yang termasuk dalam sumber daya yang dapat diperbarui adalah tanaman dan hewan dan energi yang dihasilkan oleh proses tenaga alam (air, tanah, angin, pasang surut, sinar panas matahari). Akan tetapi apabila telah melewati kapasitas maksimum regenerasinya, sumber daya ini dapat berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Proses dan cara yang diperlukan untuk mengembalikan keberadaan sumber daya alam ini pun tidak sulit, oleh karena itu sumber daya ini dikatakan tidak akan habis walau setiap hari dikonsumsi oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam sendiri dilakukan pada berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan dan sektor pertambangan.

Jhingan (2007 : 67) menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber alam atau tanah. Suatu negara yang memiliki sumber dalam yang melimpah dapat membangun perekonomian dengan cepat. Pada negara yang kurang berkembang, sumber alam sering terbengkalai atau kurang pemanfaatannya. Ketersediaan sumber alam yang melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan juga pemanfaatan secara tepat.

Lebih lanjut, Todaro dan Smith (2006 :54) berpendapat bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi kualitas ataupun kuantitas sumber daya pada negara tersebut, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya fisik (*physical resources*) atau kekayaan alam maupun sumber daya manusia (*human resources*). Lebih lanjut Todaro dan Smith menjelaskan bahwa beberapa negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah biasanya memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, misalnya pada negara negara penghasil minyak seperti pada kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Bahrain dan Iran. Sebaliknya kasus ekstrem yang memperlihatkan betapa sengsaranya negara yang kurang beruntung karena tidak memiliki sumber daya alam yang baik misalnya pada negara Chad, Yaman, Haiti dan Bangladesh. Negara ini memiliki sedikit sumber daya alam yang bisa digunakan dan negara - negara ini dikategorikan sebagai negara miskin dengan pertumbuhan dan posisi perekonomian yang rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

2.6 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki manusia (Hasibuan, 2003). Lebih lanjut Hasibuan menjelaskan bahwa SDM merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. SDM merupakan unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kemajuan teknologi tidak berarti apa apa tanpa peranan aktif SDM. Menurutnya setiap manusia memiliki daya pikir yang merupakan kecerdasan yang dibawa dari lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan).

Dalam mengelola sumber daya manusia itu sendiri dibutuhkan sebuah manajemen yang biasa disebut manajemen sumber daya manusia. Terdapat banyak pengertian pengembangan sumber daya manusia di dunia, menurut Bank Dunia (1990) dalam Subekhi dan Jauhar (2012), manajemen sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi.

Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan input pendidikan yang baik. Hasil dari pendidikan itu sendiri dapat berupah kemampuan sumber daya alam seperti angkatan kerja. Pada faktanya, kenaikan jumlah yang berpendidikan formal ini disertai juga dengan kecenderungan naiknya tingkat pendidikan angkatan kerja. Akan tetapi faktor perbedaan tempat (desa - kota) dan jenis kelamin masih menjadi masalah, angkatan kerja yang tingkat pendidikannya rendah masih menonjol.

Menurut Todaro (2006), selain dipengaruhi oleh sumber daya fisik atau sumber daya alam, besar kecilnya pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat

dipengaruhi oleh sumber daya manusia (*human resources*). Oleh karena itu sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kondisi kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan mendasar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengalaman selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan lebih cepat bangkit dari krisis yang melandanya. Misalnya pada negara -negara maju seperti Korea, Jepang dan Singapura, negara -negara ini jarang mengalami krisis ekonomi yang parah seperti yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Secara langsung ataupun tidak langsung, kualitas sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

2.7 Pendekatan Produk Unggulan Daerah

Konsep terkait produk unggulan daerah (PUD) sebagaimana pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2014. PUD merupakan komoditas khas daerah yang potensial untuk dikembangkan dan berdaya saing tinggi, dapat menyerap tenaga kerja lokal, dikelola berdasarkan kearifan lokal, serta mampu memasuki pasar global, sehingga dapat berkembang dan mendorong perekonomian daerah (Kardiantoro & Sumarsono, 2021).

Pengembangan PUD dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui penetapan strategi dan rencana aksi, pengelolaan, dan pengawasan (Setiajatnika & Astuti, 2022). Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam pengembangan PUD antara lain melalui pengembangan inkubator, pembentukan klaster dan *one village one product (OVOP)*. Selain itu pengembangan PUD juga

dapat dilakukan melalui pendekatan sesuai PP UMKM diantaranya melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster atau kelompok.

2.6 Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis Komoditas Lokal

Pembangunan perekonomian daerah dilakukan melalui menumbuhkan ekonomi masyarakat merupakan upaya strategis dalam mewujudkan daerah yang mandiri. Upaya pengelolaan potensi daerah dapat dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta (Cahyono & Indrayani, 2020). Pengelolaan potensi unggulan daerah tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membuka kesempatan kerja serta meningkatkan perekonomian daerah (Azzat & Mujiraharjo, 2020).

Pengembangan PUD dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya dan kompetensi daerah secara optimal. Pengembangan tersebut dilaksanakan dengan tujuan menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak mengatasi persoalan kemiskinan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan PUD dilakukan dengan pemanfaatan dan optimalisasi potensi dan sumberdaya daerah. Sumber daya yang dimaksud tersebut berpotensi untuk dikembangkan, bernilai ekonomis dan berdaya saing tinggi, serta dikelola melalui kelembagaan masyarakat setempat (Gani & Muliati, 2018). Pengembangan PUD pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat secara konsisten dan berkelanjutan, berdasarkan pada potensi dan sumber daya daerah tersebut (Hasiholan et al., 2021).

Terdapat keterkaitan yang erat antara PUD dan daya saing daerah. Pengembangan PUD sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya saing

daerah (Andhyka, 2019). Peran penting tersebut sehingga memerlukan perhatian bersama. Pengelolaan PUD selama ini menghadapi berbagai kendala dalam pengembagannya, seperti pengelolaan produk yang tidak optimal dan belum berorientasi mutu global. Persoalan dalam pengembangan PUD tersebut berimbas pada masih rendahnya skala ekonomis yang dihasilkan serta hambatan untuk masuk dalam pangsa pangsa pasar yang lebih luas.

2.7 Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

2.8 Konsep Dasar Model Input-Output

Menurut BPS (2008) pengertian Tabel Input-Output (Tabel I-O) adalah suatu tabel yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matrik. Analisis Input-Output merupakan analisis yang melihat keterkaitan antar sektor ekonomi. Jika terjadi perubahan dalam tingkat produksi suatu sektor, maka dapat dilihat dampaknya terhadap sektor lain. Sistem Input-Output disusun berdasarkan asumsi perilaku ekonomi yang merupakan penyederhanaan kerangka untuk mengukur input dan output berbagai faktor kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (Dimas Gadang, 2010).

Model input-output pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wassily Leontief pada akhir dekade 1930-an, dengan dasar pemikiran *Tableau Economique* yang dikembangkan oleh Francis Quesnay pada tahun 1758. Leontief menyusun *Tableau Economique* dengan menggunakan Teori Keseimbangan Umum (*General Equilibrium Theory*). Dengan teori tersebut, Leontief menyusun hubungan antara satu kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi lainnya secara kuantitatif.

Analisis dengan model I-O berbasis pada suatu tabel yang berbentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa (dalam ukuran unit moneter, misalnya rupiah) serta saling keterkaitan antar suatu kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu (Firmansyah, 2006). Analisis I-O dapat digunakan untuk melihat sektor demi sektor dalam perekonomian hingga tingkat yang sangat rinci, sehingga analisis ini cocok digunakan untuk bidang ilmu ekonomi perencanaan.

Menurut Marsudi Djojodipuro (1992), analisis *input-output* merupakan penerapan teori keseimbangan umum terhadap gejala produksi secara empirik. Dalam analisis input-output menunjukkan adanya saling berhubungan dan saling ketergantungan antar sektor dalam perekonomian. Dan diharapkan saling berhubungan dan keterkaitan antar sektor akan menciptakan keseimbangan antara penerimaan dan penawaran dalam perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Robinson Tarigan (2007), manfaat atau kegunaan analisis input-output adalah :

1. Menggambarkan kaitan antarsektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. Dapat dilihat bahwa perekonomian wilayah bukan lagi sebagai kumpulan sektor-sektor, melainkan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Perubahan pada salah satu sektor akan langsung mempengaruhi keseluruhan sektor walaupun perubahan itu akan terjadi secara bertahap
2. Dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik (*backward linkage*) dan daya mendorong (*forward linkage*) dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang akan dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah.
3. Dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran, seandainya permintaan akhir dari beberapa sektor diketahui akan meningkat. Hal ini dapat dianalisis melalui kenaikan tingkat input antara dan kenaikan input primer yang merupakan nilai tambah (kemakmuran).

4. Sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif.
5. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah seandainya input-nya dinyatakan dalam bentuk tenaga kerja atau modal.

2.9 Asumsi Model Input-Output

Dalam model *input-output*, proses produksi menggambarkan sektor perekonomian yang produktif. Perekonomian dianggap merupakan kumpulan dari sektor-sektor yang produktif. Pembagian perekonomian menjadi berbagai macam sektor bertujuan agar setiap sektor hanya menghasilkan suatu produk.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis input-output adalah sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2001) :

1. Output total tiap sektor pada umumnya dapat digunakan sepenuhnya oleh sektor lain, oleh sektor itu sendiri dan oleh sektor permintaan akhir.
2. Setiap sektor hanya memproduksi satu produk homogen.
3. Harga, permintaan dan persediaan faktor produksi adalah tertentu.
4. Perbandingan antara hasil dan return of scale bersifat tetap.
5. Dalam produksi tidak terdapat eksternalitas ekonomis dan disekonomis.
6. Kombinasi Input ditetapkan dalam proporsi yang ditetapkan secara ketat.

Berdasarkan asumsi tersebut, penggunaan analisis input-output dalam merencanakan pembangunan haruslah bersifat hati-hati dikarenakan memiliki keterbatasan, yaitu koefisien input diasumsikan bersifat tetap, sedangkan dalam

perekonomian terus mengalami perubahan struktur. Kemudian, koefisien input-output dinyatakan dalam bentuk uang, sehingga gambaran keterkaitan dalam bentuk fisik ditutup oleh distorsi harga relatif. Kemudian, koefisiensi dari kaitan sektoral relatif sensitif terhadap tingkat agregasi. Sebagai metode kuantitatif, tabel I-O memberikan gambaran tentang :

1. Struktur perekonomian suatu wilayah yang mencakup output dan nilai tambah masing-masing sektor.
2. Struktur input antara yaitu transaksi penggunaan barang dan jasa antar sektor.
3. Struktur penyediaan barang dan jasa yang berupa barang impor maupun produksi dalam negeri.
4. Struktur permintaan barang dan jasa yang berupa permintaan oleh sektor produksi maupun permintaan untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Data yang disajikan dalam Tabel I-O merupakan informasi rinci tentang input dan output sektoral yang mampu menggambarkan keterkaitan antar sektor dalam kegiatan perekonomian. Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam proses penyusunannya. Tabel I-O bersifat statis dan terbuka karena berkaitan dengan asumsi dasar yang digunakan antara lain :

1. Keseragaman (homogeneity), yaitu mengasumsikan bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output dengan susunan input tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dan output sektor yang berbeda.

2. Kesebandingan (proportionality), yaitu asumsi bahwa hubungan antar input dan output pada setiap sektor produksi merupakan fungsi linear, artinya kenaikan dan penurunan jumlah input yang diserap suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan output sektor tersebut.
3. Penjumlahan (additivity), yaitu asumsi bahwa total efek pelaksanaan dan kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek pada masing-masing kegiatan. Hal ini menandakan bahwa semua pengaruh dari luar sistem input-output diabaikan.

Berdasarkan transaksi yang digunakan, tabel input-output terdiri dari empat jenis tabel yaitu tabel transaksi total atas dasar harga pembeli, tabel transaksi domestik atas dasar harga pembeli, tabel transaksi total atas dasar harga produsen, dan tabel transaksi atas dasar harga produsen.

Menurut Suahasil Nazara (1997), Input-Output model sisi penawaran menggunakan balas jasa input sebagai faktor eksogen. Pendekatan yang digunakan adalah perekonomian dikendalikan oleh biaya produksi. Dalam model ini, pertumbuhan sektor-sektor produksi dikarenakan adanya perubahan biaya input primer.

2.10 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan dan

pengawasan, dan pembiayaan. Dari hasil analisis data matriks IBL dan IFL menyebutkan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki potensi pada beberapa sektor salah satunya adalah peternakan. Pada regulasi yang diatur khususnya dalam rangka tata kelola peternakan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Pasal (7) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peternakan, pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan peternakan dengan mempertimbangkan poin-poin berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan dan peta potensi peternakan
- 2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2.11 Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Pada fokus Pasal (2) terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola peternakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan pengembangan peternakan dengan melakukan:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan wilayah sumber bibit dan rumpun atau galur,

- 2) Penyediaan, pengelolaan dan pengawasan SDG, mutu dan peredaran benih dan / atau bibit, dan pakan ternak
- 3) Pengawasan obat hewan,
- 4) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular,
- 5) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan,
- 6) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, dan
- 7) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data Sektoral Lapangan Usaha yang Sudah diuraikan Secara Rinci:

- Data ini merujuk pada informasi terperinci tentang sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ini mencakup segala hal terkait dengan produksi, distribusi, dan interaksi antar-sektor dalam perekonomian setempat.

Informasi Mengenai Produksi Setiap Sektor Ekonomi:

- Data mengenai produksi di setiap sektor ekonomi menunjukkan nilai output atau hasil yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut dalam bentuk barang atau jasa. Ini mencakup jumlah produksi barang atau jasa dari sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, atau sektor lain yang relevan dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo.

Besaran Permintaan Akhir:

- Informasi ini mencakup nilai atau volume permintaan akhir dari berbagai sektor ekonomi. Permintaan akhir ini bisa berasal dari konsumen akhir (rumah tangga), pemerintah, investasi, atau ekspor. Ini membantu dalam memahami seberapa besar kebutuhan akan produk-produk dari setiap sektor.

Ketersediaan Input yang Diperlukan:

- Data ini mengidentifikasi input atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh setiap sektor ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini bisa termasuk bahan baku, tenaga kerja, modal, atau input lainnya yang diperlukan dalam proses produksi.

Konsumsi di Masing-Masing Sektor:

- Informasi konsumsi ini mencakup bagaimana setiap sektor menggunakan hasil produksi, baik untuk kebutuhan internal (misalnya, bahan baku untuk proses produksi mereka sendiri) maupun untuk dijual ke sektor lain sebagai input dalam proses produksi mereka.

Data-data tersebut sangat penting dalam konstruksi matriks input-output, yang menjadi dasar utama dalam Analisis Input-Output. Matriks ini mencerminkan hubungan antar-sektor dalam perekonomian dan memungkinkan penghitungan dampak ekonomi dari perubahan di satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan menggunakan data ini, dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait dampak ekonomi dari produk unggulan Kabupaten Wonosobo terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan.

3.2. Jenis Data

Data jenis Input-Output yang akan digunakan dalam Analisis Input-Output adalah dataset yang menguraikan hubungan antar-sektor ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Berikut penjelasan lebih detail tentang jenis data ini:

1. Matriks Input:

- **Kebutuhan Input dari Setiap Sektor:** Matriks ini menggambarkan jumlah input atau bahan yang dibutuhkan oleh setiap sektor ekonomi di Kabupaten Wonosobo untuk memproduksi barang atau jasa. Ini termasuk bahan baku, tenaga kerja, modal, atau faktor-faktor produksi lainnya yang diperlukan.

2. Matriks Output:

- **Produksi dari Setiap Sektor:** Matriks ini mencerminkan hasil produksi atau output dari setiap sektor ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Ini mencakup jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor lainnya.

3. Matriks Koefisien Teknis:

- **Hubungan Antar-Sektor:** Matriks ini menunjukkan hubungan teknis antar-sektor ekonomi. Ini mencakup informasi tentang

seberapa besar input yang diperlukan dari setiap sektor untuk menghasilkan satu unit output di setiap sektor lainnya. Contohnya, berapa banyak produksi sektor A membutuhkan input dari sektor B, C, D, dst.

Penjelasan Tambahan:

- Matriks Input menunjukkan kebutuhan input dari sektor-sektor yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa.
- Matriks Output mencerminkan jumlah produksi atau output dari setiap sektor ekonomi.
- Matriks Koefisien Teknis membantu dalam memahami hubungan saling ketergantungan antar-sektor dan seberapa besar pengaruh satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo.

Dengan menggunakan data-data ini, dapat dibangun model analisis input-output yang memungkinkan untuk mengukur dampak ekonomi dari perubahan di satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya, serta untuk memperkirakan efek dari kebijakan atau perubahan dalam produksi atau permintaan pada perekonomian Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis Input-Output (I-O) adalah metode ekonomi yang digunakan untuk memahami hubungan antar-sektor dalam perekonomian suatu wilayah. Berikut penjelasan rinci tentang analisis ini:

1. Analisis Input-Output (I-O):

- a. **Tujuan Utama:** Memahami interaksi dan ketergantungan antar-sektor dalam perekonomian.
- b. **Konstruksi Matriks Input-Output:** Membuat matriks yang menggambarkan hubungan antara input dan output dari berbagai sektor ekonomi.

- c. **Penentuan Kontribusi Sektor:** Mengidentifikasi kontribusi masing-masing sektor terhadap produksi total dan pemakaian input dalam perekonomian.
- d. **Pemodelan Interaksi Sektor:** Memodelkan hubungan antar-sektor, menunjukkan bagaimana perubahan di satu sektor dapat mempengaruhi sektor-sektor lainnya dalam bentuk dampak ekonomi.

2. Penggunaan Matriks Input-Output:

- a. **Model Matriks Input-Output:** Membangun model matematika yang terdiri dari matriks input-output untuk merepresentasikan aliran input dan output antar-sektor.
- b. **Simulasi Dampak Ekonomi:** Memungkinkan simulasi untuk mengukur dampak dari perubahan di satu sektor (misalnya peningkatan produksi atau permintaan) terhadap sektor-sektor lainnya dalam perekonomian.

Manfaat Analisis Input-Output:

- a. **Mengukur Dampak Ekonomi:** Memungkinkan untuk memperkirakan dampak perubahan di satu sektor terhadap sektor lain dalam bentuk efek ripple atau multiplier effect.
- b. **Perencanaan Kebijakan:** Memberikan dasar untuk perencanaan kebijakan ekonomi dan pengembangan strategi di tingkat regional atau wilayah.
- c. **Identifikasi Sektor Unggulan:** Memungkinkan identifikasi sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian suatu wilayah.

Analisis Input-Output membantu dalam memahami keterkaitan antar-sektor ekonomi dan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan memodelkan hubungan ini menggunakan matriks input-output, analisis ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana perubahan di satu sektor dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya dan efeknya terhadap perekonomian Kabupaten Wonosobo.

Rumus Input-Output yang Akan Digunakan:

- Salah satu rumus dasar dalam Analisis Input-Output adalah rumus untuk menghitung total produksi (Y) dari matriks input-output, yang secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=(I-A)^{-1}X+X$$

- Dimana:
 - Y = Produksi total (output) untuk setiap sektor.
 - I = Matriks identitas.
 - A = Matriks koefisien teknis.
 - X = Permintaan akhir.

Penjelasan Rumus:

- $(I-A)^{-1}X$ menggambarkan hasil dari perhitungan invers dari selisih antara matriks identitas dan matriks koefisien teknis dikalikan dengan matriks permintaan akhir.
- Rumus ini merujuk pada estimasi produksi total untuk setiap sektor ekonomi setelah mempertimbangkan hubungan antar-sektor dalam penggunaan input dan output.
- $+X$ menambahkan kembali permintaan akhir ke hasil perhitungan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena matriks invers dari $(I-A)$ hanya mencakup interaksi antar-sektor dalam produksi, sementara X mencakup permintaan dari luar sistem ekonomi.

Rumus ini membantu dalam menghitung produksi total atau output untuk setiap sektor ekonomi berdasarkan hubungan kompleks antar-sektor dalam matriks input-output. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat memperkirakan bagaimana setiap sektor berkontribusi terhadap produksi total dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo.

Perlu dipahami bahwa dalam kajian ini akan di hitung nilai *Index backward linkage* (IBL) dan *index forward linkage* (IFL). IBL dan IFL adalah dua konsep yang terkait dengan pengaruh suatu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam suatu ekonomi.

1. Index Backward Linkage (ILB):

- Ini mengukur seberapa besar suatu sektor ekonomi bergantung pada sektor lain dalam rantai produksi.
- ILB mengacu pada ketergantungan suatu sektor terhadap sektor-sektor sebelumnya dalam rantai nilai ekonomi. Contohnya, sektor manufaktur mungkin memiliki ILB yang tinggi karena memerlukan bahan baku dari sektor pertanian atau penambangan.
- Penilaian ILB membantu dalam memahami dampak perubahan di satu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian.

2. **Index Forward Linkage (IFL):**

- IFL mengukur seberapa besar sektor ekonomi tertentu memengaruhi sektor lain dalam rantai nilai ekonomi.
- Ini menunjukkan seberapa besar permintaan dari satu sektor menciptakan aktivitas ekonomi di sektor lain. Misalnya, pertumbuhan sektor teknologi informasi mungkin memiliki dampak positif pada sektor jasa karena peningkatan permintaan akan layanan TI.
- Mengetahui IFL penting untuk merencanakan pengembangan sektor ekonomi karena dapat membantu dalam memperkirakan dampak dari pertumbuhan atau penurunan suatu sektor terhadap sektor lainnya.

Index Backward Linkage (IBL) dan *Index Forward Linkage (IFL)* adalah ukuran yang digunakan dalam Analisis Input-Output untuk mengevaluasi keterkaitan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Berikut adalah penjelasan rinci untuk menghitung IBL dan IFL:

1. **Perhitungan Index Backward Linkage (IBL):**

Langkah 1: Konstruksi Matriks Koefisien Teknis (A):

- Dari data Input-Output, buatlah matriks koefisien teknis (A) yang menunjukkan proporsi dari setiap sektor ekonomi yang digunakan sebagai input oleh sektor lainnya.

Langkah 2: Hitung Produksi Total (Y):

- Gunakan rumus $Y=(I-A)^{-1}X$ untuk menghitung produksi total (Y) dari setiap sektor ekonomi, di mana I adalah matriks identitas dan X adalah permintaan akhir.

Langkah 3: Hitung Perubahan Produksi (ΔY):

- Lakukan perubahan dalam produksi total dari setiap sektor ekonomi sebagai respons terhadap pertambahan satu unit permintaan akhir pada sektor tertentu.

Langkah 4: Hitung Perubahan Permintaan Akhir (ΔX):

- Lakukan perubahan satu unit dalam permintaan akhir dari sektor tertentu dan lihat bagaimana itu mempengaruhi produksi total dari sektor lain.

Hitung IBL:

- IBL adalah perbandingan perubahan produksi suatu sektor (ΔY) terhadap perubahan permintaan akhir suatu sektor (ΔX) dari sektor lain: $IBL = \Delta X / \Delta Y$
- IBL mengukur sensitivitas produksi suatu sektor terhadap perubahan permintaan akhir dari sektor lain.

2. Perhitungan Index Forward Linkage (IFL):

Langkah 1: Hitung Perubahan Produksi (ΔY):

- Lakukan perubahan dalam produksi total dari setiap sektor ekonomi sebagai respons terhadap pertambahan satu unit input dari sektor tertentu.

Langkah 2: Hitung Perubahan Input (ΔA):

- Lakukan perubahan satu unit dalam matriks koefisien teknis (A) dari sektor tertentu dan lihat bagaimana itu mempengaruhi produksi total dari sektor lain.

Hitung IFL:

- IFL adalah perbandingan perubahan produksi suatu sektor (ΔY) terhadap perubahan input (ΔA) dari sektor lain: $IFL = \Delta A / \Delta Y$

- IFL mengukur sensitivitas produksi suatu sektor terhadap perubahan input dari sektor lain.

Analisis Hasil:

- Nilai IBL yang tinggi menunjukkan sektor yang memiliki dampak besar terhadap produksi sektor lainnya melalui permintaan akhir.
- Nilai IFL yang tinggi menunjukkan sektor yang memiliki dampak besar terhadap produksi sektor lainnya melalui penyediaan input atau bahan kepada sektor lain.

Dalam praktiknya, kedua indeks ini membantu para ekonom dan pengambil kebijakan untuk memahami ketergantungan dan interaksi antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Dengan memahami hubungan ini, mereka dapat merencanakan strategi ekonomi yang lebih efektif dan memprediksi dampak dari perubahan di satu sektor terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dengan perhitungan ini, maka sektor mana yang memiliki keterkaitan yang kuat dalam mempengaruhi sektor-sektor lain dalam perekonomian bisa dinilai. Penggunaan Analisis Input-Output dengan data sektoral lapangan usaha yang sudah diuraikan secara rinci akan memungkinkan untuk mengukur dampak dari perubahan di satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya, memahami hubungan antar-sektor, dan merumuskan strategi pengembangan produk unggulan dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

**“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU
DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut di jabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan

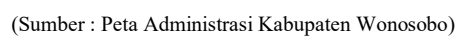
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Gambaran Umum Daerah

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03% dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupatentetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 7⁰.11'.13" dan 7⁰.36'.40" garisLintang Selatan (LS) serta 109⁰.43'.19" dan 110⁰.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo



Kondisi Geografis Daerah

Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan

Tabel 4.1

Luas Daerah, Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	19
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,2	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98.468	100	236	29	265

Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di

atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 7 wilayah kemiringan, yaitu:

Tabel 4.2

Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
1.	0 - 2 %	1.052,263	Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek (1,04 % dari luas seluruh wilayah)
2.	2 - 5 %	22.969,500	Terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang (22,89 % dari luas seluruh wilayah)
3.	5 - 8 %	8.143,769	Tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang (8,11% dari luas seluruh wilayah)
4.	8 – 15 %	55.434,850	Semua kecamatan (55,2% dari luas seluruh wilayah)
5.	15 – 25 %	11.101,600	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo (11,06% dari luas seluruh wilayah)
6.	25 – 40 %	1.479,631	Kecamatan Kejajar, Garung dan Kalikajar (1,47% dari luas seluruh wilayah)
7.	>40 %	142.362	Kecamatan Kejajar (0,14% dari luas seluruh wilayah)

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2022

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor pariwisata, pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah longsor.

Struktur Geologi

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuartar. Endapan gunung api kuartar masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan dibagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi).

Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang terbentuk oleh proses orogenesis dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada jaman Kuartar ($\pm 1,8$ juta tahun yang lain), rangkaian gunung api tersebut terus berlanjut dan bersambung dengan kompleks gunung api Dieng dan Rogojembangan. Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman *Pleistocene* yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Hulu Sungai Serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan dibatasi oleh Zone Patahan.

Kondisi Geologi yang membentuk wilayah Wonosobo menjadikan banyaknya aktifitas vulkanik yang dominan di Wonosobo. Salah satu bentuknya yaitu adanya Kawah yang banyak kita temui di kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Kawah ini juga digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kontrol energi vulkanik yang dominan juga berdampak terhadap tingkat kesuburan tanah yang berada di Wilayah Utara Kabupaten Wonosobo (Kec. Kejajar, Kec. Garung, Kec. Mojotengah, Kec. Watumalang, Kec. Kertek

Gambar 4.2
Peta Geologi Kabupaten Wonosobo



(Sumber : RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031)

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial (aliran sungai).Bentukan bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunung api material piroklastik. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan

pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 mdpl – 2250 mdpl dengan dominasi pada rentang 500 mdpl – 1000 mdpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3–26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu, Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunung api kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 meliputi lahan sawah sebesar 14.887,7 Ha (14,38%) dan bukan lahan sawah 88.515,84 Ha (85,62%). Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031, peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, permukiman seluas 71.980,01 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sebesar 923.793 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 471.535 jiwa dan penduduk perempuan 452.258 jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 95.476 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang merupakan kecamatan dengan

jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat persentase 29.082 jiwa. Tabel 1.3-1.6 menjelaskan kondisi kependudukan/demografi Kabupaten Wonosobo per Desember Tahun 2022.

Tabel 4.3
Data Penduduk Wonosobo Tahun 2022 Berdasarkan Pencatatan
Administratif Kependudukan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wadaslintang	32.738	32.040	64.778
2	Kepil	34.703	33.325	68.028
3	Sapuran	33.202	31.460	64.662
4	Kaliwiro	28.194	27.502	55.969
5	Leksono	24.417	23.997	48.414
6	Selomerto	28.277	27.787	56.064
7	Kalikajar	38.485	36.449	74.934
8	Kertek	48.168	46.382	94.550
9	Wonosobo	48.177	47.299	95.476
10	Watumalang	30.163	28.827	58.990
11	Mojotengah	35.698	33.218	68.916
12	Garung	30.747	28.735	59.482
13	Kejajar	24.764	23.120	47.884
14	Sukoharjo	18.916	17.921	36.837
15	Kalibawang	14.886	14.196	29.082
Jumlah		471.535	452.258	923.793

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 4.4
Data Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No.	Rentang Umur	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	00 - 4 tahun	26.346	24.446	50.792
2	05 - 9 tahun	36.874	34.025	70.899
3	10 - 14 tahun	38.295	35.996	74.291
4	15 - 19 tahun	32.226	31.398	63.624
5	20 - 24 tahun	37,713	36,189	73,902

No.	Rentang Umur	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
6	25 - 29 tahun	37,085	34,611	71,696
7	30 - 34 tahun	36,75	33,706	70,456
8	35 - 39 tahun	34,643	32,117	66,76
9	40 - 44 tahun	35,159	34,442	69,601
10	45 - 49 tahun	32,138	32,895	65,033
11	50 - 54 tahun	31,277	31,528	62,805
12	55 - 59 tahun	27,445	27,927	55,372
13	60 - 64 tahun	22,706	22,396	45,102
14	65 - 69 tahun	17,614	16,532	34,146
15	70 - 74 tahun	11,637	10,764	22,401
16	75 tahun ke atas	13,627	13,286	26,913
Jumlah		471,535	452,258	923,793

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 4.5
Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Strata Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Belum Sekolah	100.203	95.250	195.453
2	Tidak Tamat SD Sederajat	39.665	36.133	75.798
3	Tamat SD Sederajat	187.505	184.557	372.062
4	SLTP Sederajat	80.347	78.066	158.413
5	SLTA Sederajat	49.617	42.175	91.792
6	Diploma II	1.517	1.891	3.408
7	Akademi Diploma III/ Sarjana Muda	2.577	3.518	6.095
8	Diploma IV Strata I	9.369	10.202	19.571
9	Strata II	698	452	1.150
10	Strata III	37	14	51
JUMLAH		471.535	452.258	923.793

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Tabel 4.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo (persen)
Tahun 2021-2022

PDRB Pengeluaran Sektor	Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)	
	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi	76.27	76.85
Pengeluaran Konsumsi	1.93	1.99
Pengeluaran Konsumsi	7.77	7.24
Pembentukan Modal Tetap	19.54	19.05
Perubahan Inventori	1.46	1.74
Net Ekspor Barang dan Jasa	-6.97	-6.87
Produk Domestik Regional	100	100

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2023

Tabel 4. 7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wonosobo (persen) Tahun 2021-2022

PDRB Pengeluaran Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4.17	4.18	4.63	-1.19	1.80	5.04
Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.46	5.65	11.77	-1.65	1.38	4.25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.70	4.56	1.58	-4.51	0.55	0.25
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.89	6.48	4.76	-6.82	6.93	1.90
Perubahan Inventori	-	-7.76	6.37	84.89	-34.65	26.05
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-9.35	-22.80	6.80	-63.96	55.68
Produk Domestik Regional Bruto	4.14	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,02 persen, hal ini dikarenakan banyak kegiatan sektor ekonomi masyarakat maupun pemerintahan yang mulai beroperasi setelah pandemi COVID-19 Tahun 2020.

Tabel 4.8
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) menurut Harga Berlaku

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.021.610,84	5.253.822,70	5.475.274,62	5.855.198,79	6.025.201,52	6.390.439,70
B. Pertambangan dan Penggalian	154.965,21	162.897,14	184.204,85	192.879,92	213.431,20	216.017,95
C. Industri Pengolahan	2.824.021,40	3.088.400,44	3.346.650,85	3.408.678,82	3.661.164,60	3.877.945,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.439,91	5.721,18	5.973,73	6.054,37	6.377,34	6.734,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.605,72	17.527,45	18.662,87	19.967,95	20.946,29	2.188,30
F. Konstruksi	1.067.205,00	1.182.811,28	1.279.556,09	1.237.500,88	1.365.241,71	1.472.643,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.731.288,99	2.957.569,62	3.223.474,81	3.122.136,58	3.392.559,04	3.602.356,97
H. Transportasi dan Pergudangan	841.192,52	907.215,95	1.000.987,24	731.584,76	774.128,43	1.246.861,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	520.348,07	558.391,04	612.543,61	527.620,87	570.851,22	703.170,45
J. Informasi dan Komunikasi	193.718,08	223.460,22	261.854,54	299.564,26	317.517,87	333.696,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	527.259,53	567.158,31	601.027,01	609.534,99	651.206,20	711.962,25
L. Real Estate	247.032,76	266.297,73	289.767,53	290.176,84	298.925,15	313.352,42
M,N. Jasa Perusahaan	43.122,83	47.860,86	54.095,31	51.592,82	53.612,95	57.789,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427.107,64	449.847,69	469.787,46	470.103,05	460.070,39	475.777,16
P. Jasa Pendidikan	1.039.865,84	1.142.078,75	1.251.249,62	1.278.336,98	1.296.730,30	1.336.929,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233.504,17	258.024,00	283.601,87	313.900,26	317.415,25	329.983,93
R,S,T,U. Jasa lainnya	360.814,89	404.160,49	448.952,09	423.846,93	431.482,90	493.069,08
Produk Domestik Regional Bruto	16.255.103,40	17.493.244,85	18.807.664,10	18.838.679,07	19.856.862,36	21.590.618,38

Berikut 5 sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022. Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 6390,44 miliar pada tahun 2022, disusul sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 3877,95 miliar. Ketiga sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai 3602,36 miliar. Kemudian keempat yaitu sektor Kontruksi dengan nilai 1472,64 miliar. Dan yang kelima dari sektor Jasa Pendidikan dengan nilai 1336,93 miliar

Tabel 4.9
Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,03	29,11	31,08	30,34	29,6
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,98	1,02	1,07	1,00
C	Industri Pengolahan	17,65	17,79	18,09	18,44	17,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1
F	Konstruksi	6,76	6,8	6,57	6,88	6,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,91	17,14	16,57	17,09	16,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,19	5,32	3,88	3,9	5,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Minum	3,19	3,26	2,8	2,87	3,26
J	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,39	1,59	1,6	1,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,24	3,2	3,24	3,28	3,3
L	Real Estate	1,52	1,54	1,54	1,51	1,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	2,5	2,5	2,32	2,2
P	Jasa Pendidikan	6,53	6,65	6,79	6,53	6,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,47	1,51	1,67	1,6	1,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,31	2,39	2,25	2,17	2,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100	100	100	100	100

Empat sektor yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 yaitu yang pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 29,60%, kedua industri pengolahan sebesar 17,96%, ketiga perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,68% serta keempat konstruksi sebesar 6,82%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan tertinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan PDRB secara umum.

Tabel 4.10
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,7	1,92	4,84	1,51	2,21
B	Pertambangan dan	2,76	11,74	2,41	9,67	-1,68
C	Industri Pengolahan	6,54	6,83	0,14	4,72	2,16
D	Pengadaan Listrik dan	1,92	4,26	1,78	5,81	4,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	4,73	2,08	3,9	2,05
F	Konstruksi	6,87	5,18	-3,61	6,73	2,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,55	6,67	-4,14	7,24	1,99
H	Transportasi dan	7,02	8,33	-29,56	2,71	52,08
I	Penyediaan Akomodasi dan	6,5	8,7	-13,52	6,25	19,31
J	Informasi dan	15,39	16,13	14,23	5,85	4,98

Kategori	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan	4,13	3,86	1,38	2,39	1,4
L	Real Estate	5,31	7,12	-0,48	2,06	3,15
M,N	Jasa Perusahaan	8,37	10,27	-6,67	2,86	4,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	2,89	-1,29	-1,09	1,27
P	Jasa Pendidikan	7,36	7,67	-0,23	0,43	1,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	7,87	7,77	0,32	2,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,01	10,29	-6,74	0,71	10,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,06	5,57	-1,64	3,68	5,02

PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 4.11
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB perrkapita Kabupaten Wonosobo 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB	17.493.244,85	18.807. 664,10	18.838. 679,07	19.856.862,36	21.590.620
Jumlah Penduduk	787,384	790,504	793,403	796,523	896.346
PDRB	22,22	23,91	21,49	22,40	24,08

Catatan : *Jumlah penduduk akhir tahun 2022

Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2022

PDRB perkapita pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan meski tidak signifikan. Kenaikan PDRB perkapita ini dipengaruhi oleh menurunnya laju pertumbuhan penduduk yang selama 5 tahun terakhir rata-rata 2% per tahun. Disamping itu PDRB mengalami penurunan meskipun tidak mampu menunjukkan besarnya kesenjangan, namun angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Perekonomian Wonosobo tahun 2022 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan tahun 2022 sebesar 1.733,76 miliar rupiah yang diukur atas dasar harga berlaku, sedangkan jika diukur atas dasar harga konstan tahun 2010, pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 705,74 miliar rupiah.

Indikator Kinerja Makro

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks ini dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan indeks komposit (gabungan) hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup

Perubahan nilai IPM di Kabupaten Wonosobo dari gambar diatas menunjukkan bahwa nilai dari komponen penilaian IPM terus membaik sampai tahun 2022. Komponen tersebut diantaranya Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah serta Pengeluaran perkapita Disesuaikan. Keempat komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai menuju nilai yang lebih baik pada tahun sampai tahun 2021, seiring dengan tingkat pembangunan fisik dan non-fisik yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Nilai perkembangan nilai per komponen dalam penilaian IPM tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Komponen IPM Tahun 2019-2022 Kabupaten Wonosobo

Uraian	Satuan	Tahu			
		2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,60	71,82	71,94	72.05

Uraian	Satuan	Tahu			
		2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,74	11,75	11,76	11.78
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,67	6,81	6,82	6.88
Pengeluaran per kapita					
IPM	Angka	68,27	68,22	68,43	68.89

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2023

Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa Komposit Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi AHH, HLS, dan RLS di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan.

Tabel 4.13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Eks Karesidenan Kedu
Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1	Kabupaten Magelang	69.87	70.12	70.85
2	Kota Magelang	78.99	79.43	80.39
3	Kabupaten Purworejo	72.68	72.98	73.60
4	Kabupaten Temanggung	69.54	69.88	70.77
5	Kabupaten Kebumen	69.81	70.05	70.79
6	Kabupaten Wonosobo	68.22	68.43	68.89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 berada di urutan ke 6 terendah dan jauh di bawah rata- rata IPM Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata- rata pertumbuhan provinsi.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan dari 71,94 pada tahun 2021 menjadi 72,05 pada tahun 2022, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan pada tahun 2022 dapat bertahan hidup hingga usia 71-72 tahun. Pada tahun 2022 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Harapan Hidup tertinggi adalah Kota Magelang (77,02) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (72,05).

Tabel 4.14
Posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2022

Nama Tempat	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu, Nasional dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85
Jawa Tengah	74,23	74,37	74,47	74,57
Kabupaten Kebumen	73,22	73,4	73,55	73,70
Kabupaten Purworejo	74,52	74,72	74,87	75,03
Wonosobo	71,6	71,82	71,94	72,05
Kabupaten Magelang	73,56	73,72	73,88	74,03
Kabupaten Temanggung	75,48	75,58	75,64	75,70
Kota Magelang	76,75	76,85	76,93	77,02

Sumber : BPS Prov Jawa Tengah, 2023)

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Tabel 4. 15
Posisi Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan
Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2022

Nama Tempat	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks- Nama Tempat Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	12,68	12,7	12,77	12,81
Kabupaten Kebumen	13,04	13,34	13,35	13,36
Kabupaten Purworejo	13,49	13,5	13,51	13,52
Kabupaten Wonosobo	11,74	11,75	11,76	11,78
Kabupaten Magelang	12,53	12,54	12,55	12,58
Kabupaten Temanggung	12,13	12,14	12,32	12,55
Kota Magelang	13,81	14,14	14,15	14,31

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2023)

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sebesar 11,78 Tahun. Nilai tersebut masih dibawah nilai provinsi pada tahun 2022 sebesar 12,81 Tahun. Nilai Harapan Lama Sekolah 11,76 tahun mempunyai arti bahwa anak usia 7 tahun pada tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo hanya memiliki peluang untuk sekolah sampai ke jenjang SMA di saat anak-anak di kabupaten lain setidaknya berpeluang sekolah sampai dengan perguruan tinggi.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah dari kurun waktu 2019-2022 semakin meningkat dari 6,76 tahun menjadi 6,88 tahun. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata masyarakat Wonosobo memiliki pendidikan tertinggi sampai kelas 1 SMP (kelas 7).

Tabel 4.16
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks
Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2022

Nama Tempat	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah			
	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	7,53	7,69	7,75	7,93
Kabupaten Kebumen	7,53	7,54	7,55	7,85
Kabupaten Purworejo	7,91	8,12	8,21	8,32
Kabupaten Wonosobo	6,76	6,81	6,82	6,88
Kabupaten Magelang	7,77	7,78	7,79	7,81
Kabupaten	7,15	7,24	7,25	7,41
Kota Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94

(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2023)

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan daerah lain di eks-Karesidenan Kedu memiliki nilai yang paling rendah. Nilai tersebut juga dibawah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Nilai rata-rata lama sekolah tertinggi di eks-Karesidenan Kedu berada di Kota Magelang dengan nilai 10,94 atau setingkat kelas 1 SMA (Kelas 10).

Pengeluaran Per Kapita di sesuaikan

Standar hidup layak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan

nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Wonosobo meningkat dari Rp 10.871 pada tahun 2019 menjadi Rp 11.108 pada tahun 2022. Walaupun angka pada tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10,871 juta. Pengeluaran per Kapita ini masih dibawah dengan Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah yang bernilai Rp11.012 juta.

Tabel 4.17
Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota
Wilayah Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Nama Tempat	Pengeluaran Riil Per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Ribu Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	11 102	10 930	11 034	11 377
Kabupaten Kebumen	9 066	8 901	9 028	9 282
Kabupaten Purworejo	10 342	10 163	10 275	10 671
Kabupaten Wonosobo	10 871	10 621	10 760	11 108
Kabupaten Magelang	9 387	9 301	9 440	10 011
Kabupaten Temanggung	9 489	9 343	9 408	9 773
Kota Magelang	12 514	12 210	12 349	12 816

Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kembali mengalami kenaikan karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Wonosobo sebanyak 160,1 ribu jiwa dan pada tahun 2019 turun hingga menjadi 131,3 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 139, 67 ribu jiwa dan ditahun 2022 turun menjadi 128,11 ribu jiwa.

Tabel 4.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022 (Ribu Jiwa)

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Wonosobo	131,3	137,64	139,67	128,11

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM terdiri dari paket komoditi kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM merupakan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan yang diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Tabel 4.19
Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020-2022

KABUPATEN / KOTA	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	2020	2021	2022
Kab. Magelang	342.430	353.608	377.497
Kab. Purworejo	364.289	376.127	393.731
Kab. Kebumen	380.557	390.599	416.004
Kab. Wonosobo	362.683	373.474	399.180
Kab. Temanggung	323.705	336.034	354.012
Kota Magelang	522.099	537.783	575.130

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2023)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021, yaitu menjadi sebesar Rp 399.180. Tren garis kemiskinan selalu meningkat seiring dengan laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin.

Tabel 4.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Persen			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Wonosobo	2,44	2,42	2,75	3,18

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan dari 3,85 pada tahun 2017 menjadi 2,75 pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, gap antara garis kemiskinan dengan rata- rata pengeluaran penduduk miskin masih tinggi dan memerlukan usaha yang keras untuk dapat menaikkan rata- rata pengeluaran penduduk miskin melampaui garis kemiskinan.

Meskipun mengalami penurunan, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 masih lebih tinggi 0,84 poin dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota eks-

Karesidenan Kedu, Kabupaten Kebumen memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 3,24 dengan selisih 0,49 dibandingkan Kabupaten Wonosobo

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 1,10 pada tahun 2017 menjadi 0,65 pada tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 4.21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo 2019-2022

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Persen			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Wonosobo	0,46	0,47	0,65	0,86

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2023)

Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan selama 5 tahun terakhir relatif menurun namun mengalami kenaikan di tahun 2021. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mendekati angka nol yang artinya semakin rendah kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan, turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga bersamaan dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan semakin mendekatnya gap atau ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 4.22
Tingkat Perkembangan TPT Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Wonosobo	3,47	5,37	5,26	5,01

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 yang diproyeksikan memiliki nilai sebesar 5,01%. Mengalami penurunan daripada Tahun sebelumnya (2021). Selama lima tahun terakhir sempat berada di angka terendah yaitu berada di angka 3,43.

4.2 Analisis Input-Output Produk Unggulan Kabupaten Wonosobo

Sektor-sektor perekonomian tidaklah berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan keterkaitan. Dengan kata lain, kemajuan suatu sektor tertentu tidaklah lepas dari bantuan sektor perekonomian lainnya. Sifat keterkaitan ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan seluruh sektor perekonomian tanpa harus berfokus pada semua sektor. Dengan kata lain, pemangku kebijakan dapat berfokus pada beberapa sector yang menjadi sektor unggulan. Untuk menentukan sektor unggulan, analisis input-output perlu

dilakukan. Analisis ini unik dikarenakan analisis ini mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan mengidentifikasi sektor mana yang signifikan. Untuk menentukan sektor mana yang signifikan dan dapat menjadi sektor unggulan, analisis input output akan mengeluarkan nilai backward dan forward linkage. Backward linkage adalah kemampuan sektor tersebut dalam menyerap output sector lain, sedangkan forward linkage adalah kemampuan output sebuah sector diserap oleh sector yang lain. Keuntungan dari diterapkannya analisis ini adalah pendanaan pembangunan akan menjadi lebih efisien. Pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi sektor yang menjadi prioritas dengan tetap meningkatkan kesejahteraan sector-sektor lain. Dengan strategi ini, sumber daya yang dimiliki akan lebih efisien dan dapat difokuskan pada program pembangunan yang lain.

4.3 Hasil Analisis Kontribusi Sektor-Sektor perekonomian Wonosobo

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto terdapat nilai dari beberapa sektor-sektor perekonomian terhadap perekonomian Wonosobo. Untuk mengetahui kontribusinya, disajikan nilai Produk Domestik Produk Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010. Atas dasar harga konstan dipilih daripada atas dasar harga berlaku dikarenakan atas dasar harga berlaku ditulis dengan nilai yang ditransaksikan pada periode tahun tersebut. Dengan demikian, angka tersebut kurang bisa dibandingkan antar waktu. Sebaliknya, atas dasar harga konstan menggunakan dasar harga di tahun tertentu, yaitu dalam kasus ini adalah tahun 2010. Untuk mempermudah penjelasan, berikut adalah ilustrasinya:

Pada tahun 2010, terdapat penjualan 10 unit barang X. Pada tahun 2011, terdapat penjualan 15 unit barang X. Dikarenakan PDRB ditulis berdasarkan harga konstan pada tahun yang terpilih (diasumsikan tahun 2010), yaitu harga barang tiap unit X adalah 100, maka nilai PDRB untuk barang X tahun 2010 dan 2011 adalah 1000 dan 1500. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat kenaikan 500. Akan tetapi, jika menggunakan harga berlaku, harga barang X dapat menjadi lebih atau kurang dari harga tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terpaparnya inflasi. Dengan demikian, atas dasar berlaku sulit digunakan dalam perbandingan.

Pada tabel PDRB atas dasar konstan 2010 Kabupaten Wonosobo ini, sektor pertanian menjadi sector yang secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB Wonosobo. Pada posisi kedua dan ketiga adalah perdagangan besar dan eceran dan sector industry pengolahan. Kedua industri ini juga secara konsisten berkontribusi dalam membentuk PDRB Wonosobo secara signifikan. Akan tetapi, analisis menggunakan PDRB ini kurang memberikan gambaran keterkaitan antar sector. Oleh karena itu pada bagian selanjutnya, akan ditunjukkan hasil analisis input output.

Tabel 4. 23
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Wonosobo (miliar rupiah), 2018–2022

No	Sektor	Tahun				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Pertanian	4304,00	4210,79	4148,32	3956,97	3882,42
2	Pertambangan dan Penggalian	138,87	141,24	128,79	125,76	112,55
3	Industri Pengolahan	2496,62	2443,79	2333,75	2330,46	2181,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	5,41	5,12	5,03	4,82

No	Sektor	Tahun				
		2022	2021	2020	2019	2018
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	17,57	17,22	16,57	16,23	15,50
6	Konstruksi	954,06	931,60	872,83	905,51	860,88
7	Perdagangan Besar dan eceran	2663,80	2611,71	2435,27	2540,52	2381,58
8	Transportasi dan Pergudangan	932,58	613,21	597,04	847,54	782,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	504,65	422,97	398,10	460,33	423,47
10	Informasi dan Komunikasi	341,11	324,93	306,98	268,75	231,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	421,35	415,53	405,84	400,33	385,46
12	Real Estate	251,00	243,34	238,43	239,58	223,66
13	Jasa Perusahaan	38,04	36,24	35,24	37,76	34,24
14	Jasa Pendidikan	796,70	786,71	783,38	785,22	729,29
15	Jasa Kesehatan	218,70	214,26	213,57	198,17	183,71
16	Jasa Lainnya	367,41	331,38	329,06	352,85	319,93

4.4 Analisis Keterkaitan antar sektor dan Penentuan Sektor Unggulan

Analisis input-output (I-O) telah secara umum digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar sector industri dan pengidentifikasian sector unggulan. Beberapa penelitian yang menggunakan I-O sebagai strategi untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang unggulan di suatu perekonomian antara lain, Taufiqqurrachman (2022) di provinsi Jawa Timur, Sulaiman (2012) di negara Malaysia, dan Zuhdi et al., (2019) di negara Jepang.

Analisis ini dikembangkan oleh Hirschman (1958). Pada analisis ini beliau memperkenalkan dua jenis keterkaitan, yaitu keterkaitan ke belakang atau

keterkaitan atas pembelian input dari output sector lain (backward linkage) dan keterkaitan ke depan atau keterkaitan atas penjualan output (forward linkage). Dengan kata lain, backward linkage adalah nilai yang menunjukkan efek relative kenaikan input suatu sector yang mengakibatkan kenaikan output pada sector-sektor yang lain, sedangkan forward linkage adalah dorongan output suatu sector ekonomi yang meningkatkan output sector-sektor yang lain.

Pada analisis ini, semakin besar nilai backward dan forward linkage-nya, semakin besar keterkaitannya pada sector-sektor yang lain. Dari sisi perhitungan matrix-nya, keterkaitan ke belakang dihitung menurut kolom, sedangkan keterkaitan ke depan dihitung menurut baris. Secara formal, nilai diatas satu adalah nilai cut off yang menjadi parameter signifikansi. Dengan demikian, suatu sector dikatakan unggulan jika nilai indeks backward dan forward linkage secara simultan bernilai lebih dari satu. Untuk melakukan analisis ini, kami menggunakan data transaksi total atas dasar harga produsen yang dilakukan tiap sector tahun 2022.

4.5 Hasil Analisis I-O: Backward Forward Linkage

Pada analisis ini, kami akan menunjukkan hasil I-O pada 16 sector dan 39 sub-sektor. Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa sector pengolahan memiliki indeks backward linkage (IBL) dan indeks forward linkage (IFL) diatas satu. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sector pengolahan adalah sector unggulan. Akan tetapi, analaisis dengan 16 sector kurang spesifik karena sector-sektor ini terdiri dari beberapa sub-sektor. Dengan demikian, sasaran dari formulalisasi kebijakan menjadi kurang spesifik dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis lagi pada 39 sub-sektor.

Tabel 4.24
IBL dan IFL Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

Sektor Lapangan Usaha	Index of Backward Linkage	Index of Forward Linkage
Pertanian	0.993703689	1.555598228
Pertambangan dan Penggalian	0.753483218	0.792896929
Industri Pengolahan	1.179694392	1.597763875
Pengadaan Listrik dan Gas	1.165123009	0.888100237
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1.000419494	0.784118392
Konstruksi	0.973638327	1.053423765
Perdagangan Besar dan eceran	0.937903251	1.28581944
Transportasi dan Pergudangan	0.993637803	1.157565129
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.180279273	0.891265042
Informasi dan Komunikasi	0.968699349	0.865482494
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.936581941	1.105876176
Real Estate	0.909088025	0.83677882
Jasa Perusahaan	0.908903031	0.765847315
Jasa Pendidikan	0.989638042	0.861883679
Jasa Kesehatan	1.173909812	0.748417446
Jasa Lainnya	0.935297343	0.809163033

Pada analisis I-O yang kedua, yaitu dengan menggunakan data 39 sub-sektor, ditemukan bahwa sub-sektor peternakan, perikanan, industri makan minum lainnya, dan industri pengolahan lainnya memiliki IBL dan IFL lebih dari satu. Oleh karena itu, secara teori, keempat sub-sektor ini dapat diidentifikasi sebagai sub-sektor unggulan. Akan tetapi, industri makan minum lainnya dan industri pengolahan lainnya masih kurang spesifik. Hal ini dikarekan sub-sektor ini merupakan gabungan dari beberapa sub-sektor kecil yang sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, kami hanya memfokuskan perancangan regulasi pada kedua subsector, yaitu peternakan dan perikanan.

Tabel 4. 25
IBL dan IFL Menurut Sub-Sektor Perekonomian di Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022

No	Sub-sektor	IBL	IFL	No	Sub-sektor	IBL	IFL
1	Padi	0.872649	1.181076	20	Industri Opak	1.152675	0.841318
2	Jagung	0.827178	0.804489	21	Industri makan minum lainnya	1.35043	1.731095
3	Ubi Kayu	0.815193	1.063061	22	Industri perajangan tembakau	0.937322	0.742727
4	Palawija lainnya	0.846182	0.818915	23	Industri kayu dan bahan dari kayu	1.011557	0.912997
5	Kentang	0.993114	0.873424	24	Industri logam	0.893702	0.854032
6	Cabe	1.088977	0.889857	25	Industri Pengolahan lainnya	1.06861	1.348134
7	Hortikultura semusim lainnya	0.873402	0.85856	26	Listrik dan Gas	1.160477	0.988456
8	Buah-buahan	0.829657	0.879265	27	Air	0.999328	0.79709
9	Tembakau	1.009886	0.808821	28	Bangunan dan Kontruksi	0.970255	1.153396
10	Hasil perkebunan lainnya	0.831987	1.248428	29	Perdagangan	0.941973	2.14677
11	Hortikultura tahunan dan lainnya	0.869141	0.742767	30	Angkutan dan Penunjangnya	0.997301	1.669158
12	Peternakan	1.488029	1.433441	31	Jasa Akomodasi	1.160483	0.900664
13	Jasa Pertanian	0.961771	0.925099	32	Restoran/rumah makan/warung makan	1.282221	0.818543
14	Albasia	0.787023	0.87441	33	Informasi dan Komunikasi	0.978679	0.906154
15	Kayu hasil hutan lainnya	0.843392	0.757628	34	Lembaga Keuangan	0.946415	1.315942
16	Perikanan	1.196718	1.016871	35	Real Estate	0.917203	0.927363
17	Pertambangan dan penggalian	0.760784	0.826883	36	Jasa Perusahaan	0.917095	0.781644
18	Industri Carica	1.012071	0.83985	37	Jasa Pendidikan	0.996362	0.876362
19	Industri Gula Kelapa	1.272007	0.802138	38	Jasa Kesehatan	1.195573	0.758896
				39	Jasa Lainnya	0.94318	0.884276

4.6 Tata Kelola Manajemen Produk Unggulan Daerah Kabupaten Wonosobo

Memaksimalkan potensi peternakan dan perikanan perlu mempertimbangkan aspek-aspek penunjang lainnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga memiliki potensi dalam bidang perikanan dimana dalam regulasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah belum mengatur terkait penyelenggaraan dan optimalisasi potensi perikanan yang ada. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Zain et al., (2022) bahwa pengembangan kawasan peternakan perlu menekankan pentingnya faktor-faktor seperti sumber daya lahan, komoditas, produksi, dan infrastruktur pendukung, sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Budiani et al., (2018) bahwa perlu melibatkan partisipasi masyarakat dengan turut mengembangkan potensi yang telah berkembang seperti pariwisata dengan pengembangan potensi peternakan.

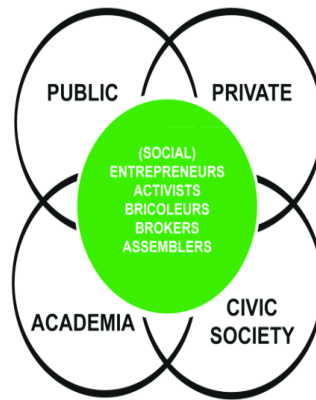
Berdasarkan analisis matriks IBL dan IFL menyebutkan bahwa terdapat potensi daerah yang belum mendapat perhatian khusus misalnya di sektor peternakan. Dari analisis penulis, Pemerintah Daerah Wonosobo dalam pengelolaan peternakan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan kurang mengakomodir potensi peternakan di

Kabupaten Wonosobo karena tidak menjelaskan penetapan kawasan peruntukan dan pemetaan potensi peternakan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola manajemen juga memiliki peran penting di dalam memaksimalkan produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Keduanya dapat menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten yang memiliki keunggulan komparatif di dalam melakukan pengelolaan produk-produk unggulan daerah sesuai dengan apa yang telah dianalisis melalui analisis input-output dan analisis ekonomi (Saptana, 2008; Sasongko et al., 2017). Sehingga dalam kajian ini, selain memproduksi hasil analisis produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo, kajian ini juga memberikan rekomendasi tata Kelola manajemen produk unggulan daerah yang dapat dilakukann oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Secara lebih jauh, memaksimalkan potensi SDM dan tata kelolanya tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan strategis. Tachjan (2006) menjelaskan bahwa kebijakan strategis merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik yang di dalamnya melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat setempat, pengusaha, dan tokoh budaya, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi dan kebutuhan komunitas. Dalam beberapa hal, ini disebut sebagai governance (tata kelola pemerintahan) (Rhodes, 2007; Fukuyama, 2016).

Gambar 4.1
Skema Governance



Sumber: (Handoyo, 2012)

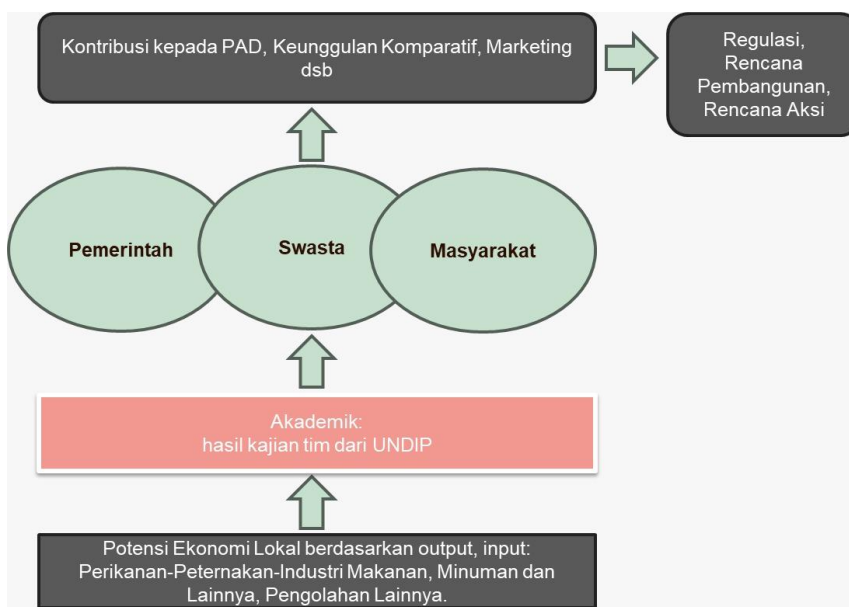
Governance pada prinsipnya adalah sebuah konsep yang coba untuk memanfaatkan potensi yang ada dan memanfaatkan peluang yang tepat. Dengan governance yang tepat, maka Kabupaten Wonosobo dapat mengambil langkah-langkah strategis yang akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal yang berharga. Ketiganya kemudian dapat meningkatkan keunggulan komparatif dari sebuah daerah. Secara lebih jelas, dapat digambarkan pada gambar 5.1.

Dari skema gambar 5.1. tersebut, dapat diterjemahkan bahwa seluruh entitas baik public, swasta (private) dan civic society termasuk para akademisi harus berkoordinasi satu sama lain untuk kemudian memproduksi social entrepreneurship yang merupakan bagian dari keunggulan komparatif yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dalam koordinasi SDM dan tata kelola, publik, private, academia dan

civic society terus disatukan dengan consensus mengenai social entrepreneurship yang ingin dibangun di Kabupaten Wonosobo.

Adapun secara luas, governance juga berbicara mengenai bagaimana struktur, tugas dan fungsi dari sebuah institusi bergerak pada satu tujuan. Keterikatan pada satu tujuan berfungsi sebagai kontrol interaksi antara publik, private, academia dan civic society untuk kemudian memiliki tujuan bersama. Skema yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tawaran Governance



Sumber: (Penulis, 2023)

Dari skema diatas terlihat bagaimana potensi ekonomi lokal berdasarkan analisis input-output yang kemudian dinaikkan menjadi hasil kajian tim UNDIP. Hasil kajian tim UNDIP sendiri kemudian tidak hanya melakukan analisis produk unggulan Kabupaten Wonosobo, namun juga bagaimana governance (tata kelola manajemen) antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo bekerja di dalam memaksimalkan potensi unggulan ekonomi daerah. Pada akhirnya, governance atas potensi lokal kemudian dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi keunggulan komparatif dan marketing ekonomi-sosial bagi Kabupaten Wonosobo. Ketika analisis produk unggulan dapat didefinisikan dan governance dapat dirumuskan, maka regulasi, rencana

pembangunan dan rencana aksi patut dirumuskan. Ketiganya diperuntukkan untuk mengatur bagaimana SDM dan tata kelola berjalan sesuai tugas, pokok dan fungsinya agar tidak tumpang tindih, bekerja efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas, terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang dapat diambil. *Pertama*, ditinjau dari identifikasi sektor unggulan menggunakan indeks backward linkage dan forward linkage, maka peternakan dan perikanan adalah sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan bagi perekonomian Kabupaten Wonosobo. Namun sektor ini tidak sendiri karena terdapat industri makan dan minum lainnya, termasuk industri pengolahan lainnya meskipun memiliki indeks backward linkage dan forward linkage lebih dari satu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kedua industri ini tidak dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dikarenakan kedua sektor ini merupakan gabungan dari sektor-sektor kecil yang tergabung menjadi satu dan sulit untuk diidentifikasi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Wonosobo dapat diprioritaskan kepada kedua sektor tersebut.

Kedua, dari tinjauan regulasi, maka potensi peternakan dan perikanan perlu dimaksimalkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penunjang lainnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Potensi perikanan ini dapat terwujud melalui regulasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, meskipun di dalamnya belum diatur tentang penyelenggaraan dan optimalisasi potensi perikanan yang ada. Secara lebih khusus, berdasarkan analisis matriks IBL dan IFL, maka terdapat potensi daerah yang belum mendapat perhatian khusus misalnya di sektor peternakan. Dari analisis penulis, Pemerintah Daerah Wonosobo dalam pengelolaan peternakan patut memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedua regulasi tersebut kurang mengakomodir potensi peternakan di Kabupaten Wonosobo karena tidak menjelaskan penetapan kawasan peruntukan dan pemetaan potensi peternakan.

Ketiga, tata kelola manajemen juga memiliki peran penting di dalam memaksimalkan produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Keduanya dapat menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten yang memiliki keunggulan komparatif di dalam melakukan pengelolaan produk-produk unggulan daerah sesuai dengan apa yang telah dianalisis melalui analisis input-output dan analisis ekonomi. Keduanya perlu diarahkan melalui kebijakan strategis. Dengan tata kelola dan kebijakan strategis yang tepat, Kabupaten Wonosobo dapat mengambil langkah-langkah strategis yang akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal yang berharga.

5.2. Rekomendasi

Dari hasil kajian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah:

1. Dari sisi analisis regulasi, belum adanya regulasi yang menetapkan Kawasan khusus untuk mengakomodir potensi peternakan di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, regulasi Kawasan perlu dikaji lebih spesifik.
2. Pengembangan kawasan peternakan perlu menekankan pentingnya faktor-faktor seperti sumber daya lahan, komoditas, produksi, dan infrastruktur pendukung.
3. Perlu melibatkan partisipasi masyarakat dengan turut mengembangkan potensi yang telah berkembang seperti pariwisata dengan pengembangan potensi peternakan.

4. Perlu adanya produksi hasil analisis produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo.
5. Seluruh entitas baik publik, swasta (private) dan civic society termasuk para akademisi harus berkoordinasi satu sama lain untuk kemudian memproduksi social entrepreneurship yang merupakan bagian dari keunggulan komparatif yang ada di Kabupaten Wonosobo.
6. Dalam koordinasi SDM dan tata kelola, publik, swasta, academia dan civic society terus disatukan dengan konsensus mengenai social entrepreneurship yang ingin dibangun di Kabupaten Wonosobo.
7. Perlu adanya governance (tata kelola manajemen) antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo bekerja di dalam memaksimalkan potensi unggulan ekonomi daerah.
8. Perlu adanya pemetaan governance atas potensi lokal kemudian dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi keunggulan komparatif dan marketing ekonomi-sosial bagi Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A., Widiastuti, E., Nugroho, A., Suharwati, A., & Fatchiyyah, A. (2022). Analisis produk unggulan daerah di kabupaten jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 19(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v19i2.3989>
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., Iskandar, H. T. N., Alphabettika, M., Maharani, N., Febriani, R. F., & Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/mgi.32330>
- Cahyaputri, B. and Sangadah, H. (2022). Penentuan produk unggulan dari olahan susu segar di kecamatan ciwidey, jawa barat. *Jurnal Optimalisasi*, 8(2), 209. <https://doi.org/10.35308/jopt.v8i2.5727>
- Cahyono, S., Falah, F., & Raharjo, S. (2020). Identifikasi sektor ekonomi unggulan di daerah tangkapan air danau rawa pening. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(1), 36-50. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.36-50>
- Darlen, M., Hadi, S., & Ardiansyah, M. (2015). Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan di kabupaten manggarai timur provinsi ntt sebagai daerah otonom baru. *Jurnal Tataloka*, 17(1), 37. <https://doi.org/10.14710/tataloka.17.1.37-52>
- Dinarjito, A. and Dharmazi, A. (2020). Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 1(2), 57-72. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Fadillah, R., Rahmi, D., & Riani, W. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di kota tasikmalaya pada tahun 2007-2020. *Bandung Conference Series Economics Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.1199>
- Fauzi, M., Erwan, F., Sastra, H., & Nura, U. (2022). Strategi pengembangan sentra ovop ikm keumamah lampulo menggunakan swot dan qspm. *Jurnal Optimalisasi*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.35308/jopt.v8i1.5283>
- Fauzi, M., Erwan, F., Sastra, H., & Nura, U. (2022). Strategi pengembangan sentra ovop ikm keumamah lampulo menggunakan swot dan qspm. *Jurnal Optimalisasi*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.35308/jopt.v8i1.5283>
- Fitri, N. and Putri, S. (2019). Effect of capital expenditure and personnel expenditure on regional economic growth: empirical evidence from western indonesia. *Jurnal Emt Kita*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.94>
- Fukuyama, F. (2016). Governance: What Do We Know, and How Do We Know It? *Annual Review of Political Science*, 19, 89–105. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042214-044240>

- Ganindha, R. and Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*.
- Hirschman, Albert O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Krisnawati, I., Ubaidi, I., Rais, H., & Batu, R. (2019). Strategi digital marketing dalam perdagangan hasil tani untuk meningkatkan pendapatan kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 70-75. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v10i2.838>
- Kurniawansyah, A. and Alinse, R. (2019). Desain program unggulan pada sistem electronic-government pemerintah kabupaten seluma. *Jurnal Teknologi Informasi*, 3(2), 130. <https://doi.org/10.36294/jurti.v3i2.935>
- Kurniawansyah, A. and Alinse, R. (2019). Desain program unggulan pada sistem electronic-government pemerintah kabupaten seluma. *Jurnal Teknologi Informasi*, 3(2), 130. <https://doi.org/10.36294/jurti.v3i2.935>
- Mafruhah, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa barat tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 109-117. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402>
- Manafe, M., Fanggidae, H., Sjoen, A., & Effendi, B. (2021). Anteseden pertumbuhan ekonomi: pendapatan atau belanja daerah?. *Wahana Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 163-179. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i2.351>
- Pangiuik, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di provinsi jambi tahun 2009-2013. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Prihastuti, A., Taufik, T., & Agusti, R. (2015). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota riau. *Sorot*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3211>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Rifai, A. and Priono, H. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening di kabupaten sidoarjo tahun 2016-2021. *Ekonomis Journal of Economics and Business*, 6(2), 434. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>
- Saptana. (2008). Keunggulan Komparatif-Kompetitif Dan Strategi Kemitraan Saptana. *Jurnal Soca (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)*, 8(2), 1–26.
- Saraswati, N. (2021). Daya dukung penyerapan tenaga kerja ditinjau dari potensi sektor unggulan perekonomian di kabupaten bantul. *Geodika Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 11-22. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3067>

- Sasongko, A. T., Purnamadewi, Y. L., & Mulatsih, S. (2017). Analisis Keunggulan Komparatif Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 90–106. <https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.90-106>
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>
- Sulaiman, N. (2012). An input-output analysis of the total factor productivity growth of the Malaysian manufacturing sector, 1983-2005. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 46(1), 147–155.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung.
- Taufiqurrachman, F. (2022). Multipler Effect in East Java (Input-Output Analysis Approach). *Jejak*, 15(2), 255–272. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.35821>
- Zain, E., Suciati, L. P., & Koesoemawati, D. J. (2022). Arah Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Unggul Ras Madura Di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. *Matrapolis Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*. <https://doi.org/10.19184/matrapolis.v4i1.34536>
- Zuhdi, U., Herlambang, T., & Nasori, N. (2019). Using multiplier analyses in analyzing the roles of Japanese industrial sectors. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5C), 229–232. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1033.0585C19>